



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAISAL AMIR MASDUKI
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 956684

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	962.000.000
1. MOTOR, YAMAHA ZOP-R AIT Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	13.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WO 2.4 RS AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	725.000.000
3. MOTOR, SUZUKI FK 110 SCD K6 Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	7.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI KL 150L (NINJA R) CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	27.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI NINJA 150 Tahun 2003, HASIL SENDIRI	Rp.	15.000.000
6. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA2.4V Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	175.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.052.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.052.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.